

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

TAHUN ANGGARAN 2019



**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

Jl. Ahmad Yani KM. 68 Telp. (0532) 2033700 Fax. (0532) 2033562

KARANG MULYA 74183

@2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Berkat dan Rahmat-Nya, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 dapat tersusun sesuai dengan rencana.

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan SKPD ini merupakan bahan untuk proses perencanaan pembangunan pada Urusan Pemerintahan di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2017 – 2022 yang mengedepankan skala prioritas dengan mempertimbangkan isu atau aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.

Output dari Rencana Kinerja Tahunan Perubahan SKPD ini bermuara pada peningkatan pelayanan masyarakat, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Lebih lanjut akan meningkatkan perekonomian, yang secara tidak langsung menjadi salah satu faktor terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa Rencana Kinerja Tahunan Perubahan SKPD ini masih jauh dari yang diharapkan, akan tetapi langkah-langkah perbaikan akan terus dilakukan oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami hargai. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan SKPD ini hingga selesai dan terwujud.

Akhir kata, harapan kami semoga isi Rencana Kinerja Tahunan Perubahan SKPD ini dapat bermanfaat dan dalam pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik.

Karang Mulya, Oktober 2019

CAMAT PANGKALAN BANTENG



Drs. EDIE FAGANTI

NIP. 19650802 199304 1 010

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
 BAB II: VISI DAN MISI	
1. VISI.....	5
2. MISI.....	5
 BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM TERPILIH	
A. TUJUAN.....	7
B. SASARAN	7
C. PROGRAM	7
 BAB IV: KEBUTUHAN DATA KINERJA	
4.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.....	10
4.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	12
4.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	14
4.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	15
BAB V: RENCANA KINERJA	20
BAB VI: PENUTUP.....	21
 LAMPIRAN: RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah yang dilaksanakan melalui *penguatan otonomi daerah* dan *pengelolaan sumber daya* yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut maka diperlukan suatu pengintegrasian dan perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 150 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana pembangunan dijadikan sebagai acuan kegiatan sesuai dengan kurun waktu perencanaan dan dapat juga dijadikan tolok ukur, evaluasi, capaian kegiatan dari organisasi. Apabila implementasi kegiatan mengalami suatu kendala, maka yang perlu dievaluasi selain sistem penyelenggaraan juga yang tidak kalah penting adalah sejauh mana sebuah perencanaan dapat mencapai kebutuhan riil dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai salah satu wilayah kerja perangkat daerah, sebagaimana ketentuan menyusun Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT Perubahan) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan Kinerja Tahunan Perubahan (RKT Perubahan) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dan salah satu unsur komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang harus dilakukan setiap instansi. Dengan membangun sistem perencanaan yang menyeluruh yang meliputi perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan bagian dari teknik dan fungsi manajemen untuk peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam guna menentukan target yang realistis.

Dalam penyusunan RKT Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak terlepas dari perencanaan strategis, rancangan awal RKPD serta mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Sementara Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan RKT Perubahan SKPD, selaras dengan Renja dan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya hal ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi serta menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Sebagai unit kerja yang kompleks karena merupakan locus dan focus dari kegiatan SKPD, barometer capaian kegiatan (goal) bisa terukur dengan jelas sejauh mana keterpaduaan rencana yang telah tersusun.

Karena itu, keberhasilan pembangunan yang ada di kecamatan pada sisi lain sangat tergantung pada perencanaan menyeluruh yang diarahkan untuk memenuhi tujuan itu semua.

Selain perencanaan, yang tidak kalah penting adalah mengetahui karakteristik wilayah (komparatif dan kompetitif advantied) yang dimiliki oleh kecamatan. Karena itu, Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai salah satu kecamatan yang berada pada posisi strategis dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta berada di daerah perbatasan, mencitrakan diri pada posisi sebagai "Kota Perbatasan Pencitraan Kabupaten". Maknanya adalah masyarakat dari wilayah lain akan melihat riil Kotawaringin Barat Pangkalan Bun ada pada Kecamatan Pangkalan Banteng.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (1) bahwa "Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia". Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional merupakan dokumen perencanaan nasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah, sedangkan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT Perubahan) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber dana pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT Perubahan) Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksudkan untuk memberi arah bagi penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun tujuan penyusunan RKT Perubahan Kecamatan Pangkalan Banteng adalah :

1. Sebagai bahan masukan kepada pihak lain terhadap arah rencana pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai locus/focus kegiatan SKPD.
2. Ada konsistensi dan kesinambungan rencana dalam setiap tahapan/kurun waktu.
3. Adanya prioritas kegiatan yang menjadi penekanan dan diharapkan menjadi perhatian dari SKPD tingkat kabupaten.

4. Mewujudkan ketepatan dan kesepakatan tindak lanjut sebagaimana prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Kecamatan Pangkalan Banteng disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini berisikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya;
- BAB II : VISI DAN MISI, dalam bab ini berisikan ikhtisar Visi dan Misi SKPD, Visi dan Misi merupakan rencana streatejik yang paling global untuk kemudian dijabarkan lagi secara rinci;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM TERPILIH, dalam bab ini berisikan penjabaran lebih lanjut atas Visi dan Misi adalah Tujuan, Sasaran dan Program Tahunan SKPD;
- BAB IV : KEBUTUHAN DAN KINERJA, dalam bab ini berisikan sumber-sumber data penyusunan RKT Perubahan SKPD;
- BAB V : RENCANA KINERJA, dalam bab ini berisikan uraian tentang sasaran strategis, indikator kinerja serta target-target dari masing-masing indikator kinerja sasaran tahunan SKPD;
- BAB IV : PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

VISI DAN MISI

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan untuk dicapai.

Dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah, Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan hal ini tertuang dalam Visi Kecamatan Pangkalan Banteng.

1. Visi

Dalam rangka menjabarkan Manajemen Strategis terhadap tugas dan fungsi Organisasi Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng yang diwujudkan dalam kurun waktu tertentu mengacu pada Visi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut:

***“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN
KERJA NYATA DAN IKHLAS”***

Jika merujuk pada visi tersebut, maka dapat diamati bahwa, Kecamatan mempunyai andil dalam menunjang Visi Kepala Daerah.

2. Misi

Sebagai pondasi penyusunan RKT Perubahan yang menunjukkan dengan jelas arti pentingnya ekstensi organisasi dan merupakan alasan dasar berdirinya organisasi, maka dirumuskan Misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna. Melalui misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan tugasnya masing-masing serta program – program dan hasil yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun Renstra.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai misi sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;

Merujuk pada Misi tersebut, misi yang harus diampu oleh Kecamatan Pangkalan Banteng adalah poin kesatu yaitu

“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”.

Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat harus berperan aktif dalam mewujudkan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM TERPILIH

A. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mendukung misi Kepala Daerah poin pertama, Kecamatan Pangkalan Banteng merumuskan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan di wilayah kecamatan.

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
2. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah
3. Meningkatnya Pelayanan Publik
4. Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan

C. Program

Secara umum misi dinyatakan dalam kegiatan tahunan yang berkesinambungan, sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Pangkalan Banteng dengan penjabaran pelaksanaan kegiatan berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f. Penyediaan Alat Tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - j. Penyediaan makanan dan minuman
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pembangunan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas
 - d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - e. Pengadaan Meubelair
 - f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan
 - g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
 - h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan.
- a. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 - b. Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/ Kelurahan

- c. Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/
Kelurahan
- d. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat.

BAB IV

KEBUTUHAN DATA KINERJA

4.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Banteng pada tahun 2018 terkait dengan target dan realisasi capaian dapat dilihat secara umum pada tabel berikut:

Tabel. 4.1
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome
Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2018

No.	Program dan Kegiatan	Input			Output			Outcome		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Uraian	Real	Sat.	Uraian	Real.	Sat.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	94.668.200	76.668.389	80,99	Sarana kominikasi dan penerangan	12	bulan	Tercapainya pemakaian sarana komunikasi dan penerangan yang maksimal	100	%
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.550.000	2.254.500	88,41	Perpanjangan STNK kendaraan bermotor	9	Unit	Perpanjangan STNK Kendaraan dinas/ operasional	100	%
c.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	143.186.800	114.826.774	80,20	Jasa administrasi keuangan	12	bulan	Kegiatan administrasi keuangan dapat terselenggara dengan baik	100	%
d.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	71.606.000	71.362.000	99,66	Jasa kebersihan kantor	12	bln	Kebersihan kantor yang terpelihara	100	%
e.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.300.000	6.745.000	88,70	Jasa perbaikan peralatan kerja	3	Maca m	Peralatan kerja yang siap digunakan -Komputer 5 Unit -Notebook 5 Unit - Printer 8 Unit	100	%
f.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.007.600	22.007.600	100	Tersedianya alat tulis kantor	12	bln	Tersedianya alat tulis kantor	100	%
g.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.375.000	11.375.000	100	Barang cetakan dan penggandaan	12	bln	Tersedianya barang cetakan, penggandaan	100	%

h.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.475.000	2.430.000	98,18	Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	8	maca m	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	100	%
i.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.450.000	8.030.000	92,00	Peralatan dan perlengkapan kantor	1	maca m	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%
j.	Penyediaan Makan dan Minuman	17.500.000	17.490.000	99,94	Makanan dan minuman rapat	1	Tahun	Tersedianya makanan dan minuman rapat	100	%
k.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	143.750.000	140.810.000	97,95	Koordinasi dalam daerah dan keluar daerah	575	kali	Tercapainya koordinasi ke kepala desa dan instansi vertikal di kec. P. Banteng	156	%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
a.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	15.042.400	15.042.400	100	Jumlah dan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan yang disediakan	5	Jenis	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan	100	%
b.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35.778.000	32.148.300	89,85	Pemeliharaan gedung Kantor Pemeliharaan Aula Pemeliharaan gedung TP-PKK	1	Paket	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor dan pagar	100	%
c.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5.500.000	5.500.000	100	Pemeliharaan kendaraan dinas	9	unit	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	100	%
d.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.740.000	740.000	27,01	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	3	Tb	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor	100	%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
a.	Pengadaan Mesin Kartu Absensi	6.000.000	6.000.000	100	Pengadaan Mesin Kartu Absensi	1	Paket	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	%
b.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	13.850.000	13.300.000	100	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	26	stel	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	%
c.	Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu	9.200.000	9.200.000	100	Pengadaan Pakain hari-hari tertentu	23	Stell	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	%
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	93.003.0000	80.540.000	97,31	Bimtek untuk pegawai	8	keg	Bimtek untuk pegawai	6	%

	Perundang-undangan									
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
a.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	13.149.000	13.147.000	3	Laporan keuangan akhir tahun	1	kali	laporan keuangan akhir tahun	100	%

Dari total anggaran tersebut diatas, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan adalah **Rp. 719.113.000** dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp. 649.346.000** atau **90,29 %** yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”. Dari data 5 (Lima) program diatas terdapat indikator sasaran yang realisasi capaian kinerja keuangannya belum dapat terlaksana sepenuhnya meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 94.668.200 realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 76.668.389 (80,99 %), hal ini disebabkan 2 sambungan Pesawat telfon yang tidak terpakai sehingga yang dibayar hanyalah beban, Sesuai dengan beban pemakaian kubikasi air yang terpakai karena jumlah pemakaian tidak bisa diprediksi jumlahnya dan juga dianggarkan antisipasi adanya kenaikan tarif PDAM.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.740.000,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 740.000,- (27,01%), hal ini disebabkan disebabkan karena tidak terserapnya uang BBM Mesin Potong Rumput.

4.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kecamatan Pangkalan Banteng secara definitif diresmikan oleh Bupati Kotawaringin Barat pada Tanggal 23 Desember 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2003 Tanggal 14 Juni 2003.

Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng : 1.371 KM2 dengan jumlah desa pada awal pembentukan sebanyak 13 Desa. Pada tahun 2010 dimekarkan 4 (empat) desa baru yaitu Desa Berambai Makmur, Desa Karang Sari, Desa Sungai Pulau dan Desa Sungai Pakit.

Distribusi jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing desa dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel. 4.2
Distribusi Penduduk Desa
Di Kecamatan Pangkalan Banteng

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk			Jumlah
		KK	Laki-laki	Perempuan	
1.	AMIN JAYA	1.976	4.497	3.976	8.473
2.	ARGA MULYA	553	931	788	1.719
3.	BERAMBAI MAKMUR	223	420	369	789
4.	KARANG MULYA	1.054	1837	1.713	3.550
5.	KARANG SARI	211	377	345	722
6.	KEBUN AGUNG	370	686	662	1.348
7.	MARGA MULYA	462	867	748	1.615
8.	MULYA JADI	266	514	464	978
9.	NATAI KERBAU	506	730	782	1.512
10.	PANGKALAN BANTENG	425	914	757	1.671
11.	SIMPANG BERAMBAI	603	996	950	1.946
12.	SIDO MULYO	629	1.007	929	1.936
13.	SUNGAI BENGKUANG	742	1.573	1.372	2.945
14.	SUNGAI HIJAU	675	1.098	1.012	2.110
15.	SUNGAI KUNING	558	677	584	1.261
16.	SUNGAI PAKIT	829	1.620	1.461	3.081
17.	SUNGAI PULAU	191	311	280	591
Jumlah		10.274	19.055	17.192	36.247

Sumber: Laporan Penduduk Kecamatan Pangkalan Banteng Bulan Desember 2018

Kegiatan sosial ekonomi masyarakat terbagi secara alamiah sesuai dengan letak geografis.

1. Desa Karang Mulya dan Desa Amin Jaya, secara umum kegiatan ekonomi masyarakat bergerak disektor perdagangan dan jasa.
2. Desa Mulya Jadi, Desa Natai Kerbau, Desa Pangkalan Banteng dan desa-desa sekitarnya, kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berfokus pada kegiatan perkebunan dan sebagian pertanian tanaman pangan.
3. Desa – desa PIR dengan pusat pengembangan di Desa Sidomulyo, arah pengembangan ekonomi masyarakat yaitu pada sektor perkebunan dengan komoditas utama karet dan ditunjang dengan pengembangan komoditas lain seperti kelapa sawit, hortikultura dan pertanian tanaman pangan.

Faktor lain yang menunjang perekonomian masyarakat adalah adanya perusahaan-perusahaan besar swasta yang ada di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng, diantaranya:

1. Perusahaan perkebunan kelapa sawit:
 - a. PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona (GSPP)
 - b. PT. Gunung Sejahtera Dua Indah (GSDI)
 - c. PT. Indoturba Tengah
 - d. PT. Wanasawit Subur Lestari (WSSL)
 - e. PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP)
2. Perusahaan Perkebunan Karet
 - a. PT. Perkebunan Nusantara XIII

4.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tujuan dan sasaran program dan kegiatan pada perencanaan ini yaitu untuk pemenuhan kebutuhan rutin SKPD dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat baik itu melalui pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan serta sosial kemasyarakatan dalam rangka memberikan kesejahteraan serta pembangunan kehidupan bermasyarakat seutuhnya dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kendala utama dalam penentuan angka keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang obyektif adalah karena belum adanya standar pelayanan minimal serta standar operasional prosedur. Selain itu juga disebabkan oleh:

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
2. Kemampuan dan keterampilan yang tidak merata pada setiap personil pegawai kecamatan.
3. Belum optimalnya tingkat kedisiplinan pegawai.
4. Anggaran yang disediakan belum mencukupi kebutuhan secara penuh.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah:

1. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM dan Fasilitas yang ada serta mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan;
2. Peningkatan kinerja aparatur dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM pegawai.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi di tingkat pimpinan dan staf secara sinergis.
4. Penyesuaian kebijakan dan rencana program prioritas dengan kemampuan anggaran tersedia.

4.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Geografis dan Lingkungan
 - Mewujudkan Tata Ruang Kecamatan Pangkalan Banteng sebagaimana Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTRK) Pangkalan Banteng serta secara bertahap penetapan tata batas antar desa dengan prioritas desa-desa dalam wilayah kecamatan, tata batas dengan desa-desa di luar kecamatan dalam satu kabupaten dan dengan desa-desa di luar Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - Mendukung terciptanya lingkungan yang lestari melalui partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri perkebunan.
2. Perekonomian Masyarakat
 - Menjaga dan memacu kegiatan ekonomi masyarakat (perdagangan dan jasa) agar tetap stabil dan bahkan meningkat.
 - Memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui usulan kepada pemerintah daerah/lintas sektor terkait.
 - Memberdayakan organisasi ekonomi masyarakat (Koperasi, UKD dan lain-lain) untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
3. Kesejahteraan, Sosial Budaya dan Agama
 - Mengusulkan dan memfasilitasi pembangunan fisik pendidikan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung.

- Mengupayakan adanya fasilitas olah raga secara terpusat di ibukota kecamatan.
- Mendukung upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata terutama keluarga miskin melalui program pemerintah yang ada.
- Mendukung terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal, baik itu yang asli setempat maupun budaya yang dibawa oleh warga masyarakat eks. Transmigrasi.
- Menjamin suasana hidup kerukunan umat beragama, memfasilitasi rumah ibadah sesuai aturan yang berlaku serta membina dan mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan.

4. Bidang Pertanahan

- Mendata dan menginventarisir tanah-tanah milik warga eks. Transmigrasi berupa lahan pekarangan, lahan usaha dan lahan pangan.
- Penertiban kepemilikan/penguasaan atas tanah serta surat menyurat (administrasi pertanahan) yang dimiliki oleh masyarakat serta memfasilitasi penyertifikatan tanah masyarakat.
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan dengan mengutamakan upaya musyawarah.
- Bersama masyarakat memfasilitasi dan memberi masukan kritis terhadap rencana penggunaan tanah untuk investasi (perkebunan, pertambangan, dan lain-lain).

5. Sektor Pertanian

- Peningkatan kelembagaan dan kemampuan petani di tingkat desa.
- Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan khususnya padi dan kedelai.
- Peningkatan kemampuan terhadap upaya pencegahan organisme pengganggu (hama) tanaman dengan melibatkan upaya kerjasama petani untuk memperkecil penggunaan racun kimiawi.
- Program Pembukaan / pencetakan sawah baru dilokasi sentra penanaman padi di Desa Natai Kerbau, Pangkalan Banteng, Marga Mulya dan Mulya Jadi.
- Mengefektifkan/optimalisasi cekdam Berambai Makmur untuk pengairan yang dibarengi dengan pembukaan areal sawah sampai batas optimal.

- Peningkatan pendapatan (hasil panen) yang terus meningkat dalam setiap musim tanam.
- Pembukaan sawah baru dengan lokasi yang potensial di Desa Berambai Makmur, Desa Marga Mulya dan Desa Pangkalan Banteng dengan dukungan instansi terkait.

6. Sektor Peternakan

- Meningkatkan produksi peternakan baik yang berupa bantuan pemerintah (dengan sistem pengguliran) dan ternak yang dikelola masyarakat secara mandiri, berupa sapi, kambing, ayam/unggas dan sejenisnya.
- Pengembangan sektor peternakan hewan ternak besar (sapi/kambing) sebagai upaya untuk menggalakkan budi daya peternakan di masyarakat.
- Mendukung pelaksanaan tugas pos check point hewan ternak yang ada di Desa Amin Jaya sebagai titik pantau masuknya hewan ternak dan unggas dari luar daerah ke Pangkalan Bun.

7. Sektor Perikanan

- Program pengembangan perikanan darat di beberapa desa potensial yaitu Desa Pangkalan Banteng dengan menggunakan sistem keramba dan kolam ikan di Desa Natai Kerbau, Mulya Jadi, Sidomulyo dan Amin Jaya.
- Pengembangan tambak untuk masyarakat dengan memanfaatkan sungai-sungai yang ada disekitar desa.
- Pengembangan budi daya kolam ikan sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

8. Sektor Perkebunan

- Pengembangan Pertanian dalam arti luas dengan sasaran perkebunan rakyat dengan memberdayakan lahan-lahan eks. Transmigrasi (LU. 1 dan LU. 2) dan lahan kosong yang dikelola oleh masyarakat / desa.
- Peningkatan dan pengembangan luasan perkebunan masyarakat, bekerja sama dengan perusahaan perkebunan terdekat untuk pengembangan komoditas sawit dan karet yang sudah berjalan sebelumnya (Sistem IGA / kemitraan).

- Pengembangan kebun desa dalam rangka pengelolaan TKD (Tanah Kas Desa) untuk semua desa dalam wilayah Kecamatan pangkalan Banteng.
- Pengembangan kebun rakyat dengan komoditas yang sudah dikenal seperti karet dan kelapa sawit.
- Memfasilitasi kerja sama antara masyarakat petani dengan perusahaan perkebunan swasta untuk pembukaan kebun masyarakat, bimbingan teknik dan pemasaran hasil.
- Mendukung dan menghimpun aspirasi masyarakat terhadap rencana replanting perkebunan karet plasma dengan PTPN 13 yang sampai pada saat ini usia tanaman sudah memasuki penurunan produktifitas (sudah tua).
- Memfasilitasi pengembangan bibit terutama kelapa sawit dan karet untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bibit yang berkualitas.

9. Bidang Badan Usaha Milik Desa/BUMDes

- Memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa / BUMDesa yang merupakan lembaga atau badan yang bergerak di bidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan.
- Program BUMDesa dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah masyarakat desa dengan mempertimbangkan :
 - a. potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. terdapatnya unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
 - c. terdapatnya kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa;
 - d. adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk kekayaan desa yang dipisahkan dari pengelolaan kekayaan Desa;
 - e. adanya unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDesa.
- Mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes yang sebagian sudah terbentuk di beberapa desa di Kecamatan Pangakalan Banteng.

10. Bidang Pemerintahan Umum

- Menjamin terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan.
- Optimalisasi personal ability melalui pembinaan, bimbingan dan supervisi.
- Mengupayakan dan mengusulkan ke Pemerintah Daerah (dinas terkait) kelengkapan minimal baik itu personil maupun sarana/prasarana pendukung operasional kegiatan untuk staf dan fisik kantor kecamatan.
- Peningkatan pengawasan dengan sistem yang mampu meningkatkan kinerja pelayanan.
- Menyusun perencanaan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan melibatkan dan mendengar aspirasi dari masyarakat.
- Pembinaan pemerintahan dan lembaga desa melalui supervisi, penyuluhan, sosialisasi dan seminasi program, kegiatan dan aturan yang terkait dengan pemerintahan desa.

BAB V

RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT Perubahan) merupakan penjabaran dari dokumen rencana kerja SKPD yang telah mendapatkan koreksi dan penetapan menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh Bupati bersama-sama dengan DPRD Kabupaten yang kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA). Adapun Komponen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT) adalah Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : *Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi*

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90 %

Sasaran 2 : *Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah;*

No	Indikator Kinerja	Target
1	Nilai SAKIP perangkat daerah	C

Sasaran 3 : *Meningkatnya Pelayanan Publik*

No	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75%

Sasaran 4 : *Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan*

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi	85%

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kecamatan Pangkalan Banteng mempunyai 4 (Empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT Perubahan) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 dibuat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pangkalan Banteng serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja tahunan sehingga rencana kinerja ini menunjukkan langkah-langkah atau rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Banteng selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkait dengan hal tersebut maka perlu adanya penguatan peran dari para *stakeholders* dalam pelaksanaan dokumen perencanaan ini.

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan ini merupakan dasar atau bahan evaluasi kinerja tahunan sebagai acuan perencanaan selanjutnya serta laporan atas pelaksanaan renstra SKPD. Sehingga perlu adanya peran aktif dan konsistensi dari para *stakeholders* dalam menjalankan program-program kegiatan yang telah direncanakan bersama demi terlaksananya semua capaian dan tujuan bersama yaitu terwujudnya pelaksanaan pembangunan daerah secara utuh dan menyeluruh.

Karang Mulya , Oktober 2019

CAMAT PANGKALAN BANTENG



Drs. EDIE FAGANTI

NIP. 19650802 199403 1 010

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD
TAHUN

: Kecamatan Pangkalan Banteng
: 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4	5
1	Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
			Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon dan surat kabar	12 bulan
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8 kendaraan
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	
			Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	
			Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
			Jumlah/jenis peralatan kerja yang diperbaiki	3 Jenis
			Penyediaan alat tulis kantor	
			Jumlah/jenis alat tulis kantor yang diperlukan	40 jenis
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
			Waktu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
			Jumlah/jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
			Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis
			Penyediaan makanan dan minuman	
			Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	474 Orang
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	658 OK
		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			Pembangunan gedung kantor	
			Jumlah gedung kantor yang dibangun	Pagar 148 M
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
			Jumlah/jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 Unit AC

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
			Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	
			Jumlah/ jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	8 jenis
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
			Jumlah/ jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Unit TV
			Pengadaan Meubelair	
			Jumlah/ jenis mebeleur yang diadakan	2 Bh Kursi Tunggu Ruang Paten
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	
			Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 Unit 95 M ²
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit 170 M ² Gedung Kantor, 212 M ² Gedung Aula
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
			Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	9 unit
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	
			Jumlah/ jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Unit (2 Buah Pengisian Tabung Gas 12 Kg, 2 Bh msn p. rumput, 8 Unit Pemeliharaan AC)
		Tingkat Kepatuhan Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	
			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	26 stel
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	
			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	22 Stel
		Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
			Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis	9 Orang
2	Menyediakan Dukungan bagi Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3 Dokumen
3	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan	
			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	
			Jumlah orang yang dibina	80 orang
4	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
			Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan	
			Jumlah desa yang difasilitasi	17 Desa
			Pembinaan dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	
			Jumlah desa yang difasilitasi	17 Desa
			Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Jumlah desa yang difasilitasi	17 Desa
			Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	
			Jumlah desa yang difasilitasi	17 Desa
No	Uraian program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 593.373.483	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 334.097.217	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp 20.200.000	APBD
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Rp 88.330.000	APBD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan		Rp 20.034.300	APBD
6	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum,		Rp 46.250.000	APBD
JUMLAH TOTAL			Rp 1.102.285.000	

Karang Mulya, Oktober 2019
Camat Pangkalan Banteng



Drs. EDIE FAGANTI
NIP. 18650802 199403 1 010